



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHDHANI ONANG PRASTOWO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 489110

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.611.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 4446 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 1.111.500.000
4. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **254.000.000**

1. MOTOR, HONDA GL 2000/SPM SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA X1802N04L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, HONDA HONDA HRV RU 1 1,5 E CVT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, HONDA TIGER 2000/GL200 SPORT Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, HONDA A1F02N37M1A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	158.600.625
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.024.100.625
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.024.100.625

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UDIYATNO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 489190

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 948.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 522 m2/132 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 1096 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , WARISAN Rp. 548.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 40.000.000

1. MOBIL, ISUZU PANTHER BONET STD/TBR54 Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, HONDA ACH1M21804 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA NF11T11CO1 M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.785.021

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.088.785.021

III. HUTANG Rp. 82.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.006.785.021

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

- Nama** : JUNIRISPINUDDIN SERUNTING
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 489189

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , WARISAN Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 37.000.000

- MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2008, WARISAN Rp. 7.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 109.199.800

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.171.900

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 852.371.700

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 852.371.700

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURGIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 814749

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 860.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 281 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 480.000.000
2. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.500.000

1. MOBIL, HONDA MPNP/SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 97.500.000
2. MOTOR, YAMAHA BBS M/T / SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
3. MOTOR, HONDA F1CO2N46LO A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 110.492.690

F. HARTA LAINNYA Rp. 96.000.000

Sub Total Rp. 1.202.992.690

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.202.992.690

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.